Efektivitas Penyaluran Zakat sebagai Bantuan Modal Usaha Kepada Pedagang Kaki Lima (PKL) oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) dalam Program Lahat Peduli di Kabupaten Lahat

Rendi Prayoga¹

Dimas Dwi Arso²

Akhmad Muslih³

^{1,2,3}Faculty of Law Universitas Bengkulu

Email Correspondence: ddarso@unib.ac.id

ABSTRACT

The poverty rate is still very large in Indonesia, this is due to the still high unemployment rate and this situation is getting worse with the Covid-19 outbreak which threatens the whole world. One of the efforts that can be made by the community in an effort to fulfill their daily needs is to become street vendors (PKL). However, they also have obstacles in running their business because they still have limited capital and this can be helped by providing business capital assistance whose sources of funds come from zakat where the institution that manages zakat funds is the National Zakat Amil Agency (BAZNAS). The purpose of this research is to find out whether the distribution of zakat funds as venture capital assistance to MSME actors by BAZNAS in the Lahat Care program in Lahat Regency has yielded effective results or not. As well as how the responsibility of BAZNAS Lahat Regency in terms of distribution of zakat funds. The type of research used in this research is empirical law. In empirical legal research law is conceptualized as an empirical phenomenon that can be observed in real life, law is empirically a symptom of society, on the one hand it can be studied as an independent variable or cause (independent variable) which gives rise to consequences in various aspects of social life. As a result, from the process of collecting zakat funds to distributing zakat funds to business actors, it has had an effective impact, many have benefited from the Lahat Cares program from BAZNAS. The SIMBA application (BAZNAS Management Information System) is an online integrated application that can be accessed by the public as a form of BAZNAS' responsibility to show transparency.

Keywords : *Effectiveness; Distribution, Responsibility, BAZNAS.*

ABSTRAK

Angka kemiskinan masih sangat banyak di Indonesia, hal itu disebabkan oleh m,asih tingginya angka pengangguran dan keadaan ini makin diperparah dengan adanya wabah Covid-19 yang mengancam seluruh dunia. Salah satu upaya yang dapat dilakukan oleh masyarakat dalam usaha pemenuhan kebutuhan hidupnya adalah dengan menjadi Pedagang Kaki Lima (PKL). Akan tetapi mereka juga mempunyai hambatan dalam menjalankan usahanya dikarenakan masih memiliki keterbatasan modal dan hal tersebut dapat dibantu dengan pemberian bantuan modal usaha yang sumber dananya berasal dari zakat dimana lembaga yang melakukan pengelolaan dana zakat adalah Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS). Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui penyaluran dana zakat sebagai bantuan modal usaha kepada pelaku PKL oleh BAZNAS dalam program Lahat Peduli Kabupaten Lahat memberikan hasil yang efektif atau tidak. Serta bagaimana bentuk

tanggung jawab BAZNAS Kabupaten Lahat dalam hal penyaluran dana zakat tersebut. Jenis Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah hukum empiris. Dalam penelitian hukum empiris hukum dikonsepsikan sebagai suatu gejala empiris yang dapat diamati dalam kehidupan nyata, hukum secara empiris merupakan gejala masyarakat, disatu sisi dapat dipelajari sebagai suatu variable bebas atau penyebab (*independent variable*) yang menimbulkan akibat-akibat dalam berbagai aspek kehidupan sosial. Sebagai hasilnya, dari proses pengumpulan hingga penyaluran dana zakat kepada pelaku usaha memberikan dampak yang efektif, banyak yang terbantu dari program Lahat Peduli dari BAZNAS ini. Aplikasi SIMBA (Sistem Informasi Manajemen BAZNAS) merupakan aplikasi yang terintegrasi secara online yang dapat diakses masyarakat sebagai bentuk tanggung jawab BAZNAS ntuk memperlihatkan transparansi penyaluran zakat.

Kata Kunci : Efektivitas; penyaluran; Tanggung Jawab; Baznas.

Pendahuluan

Jumlah penduduk miskin di Indonesia masih sangat banyak. Keadaan tersebut dapat disebabkan karena mereka tidak mempunyai pekerjaan sehingga tidak bisa mencukupi kebutuhan sehari-harinya. Fakir miskin merupakan orang yang sama sekali tidak memiliki sumber mata pencarian tetapi tidak mempunyai kemampuan memenuhi kebutuhan dasar yang layak untuk kehidupan dirinya dan keluarganya.¹ Sejak Indonesia merdeka baik dari pemerintahan orde lama, orde baru, hingga masa reformasi sekarang ini masalah kemiskinan selalu menjadi prioritas bagi setiap era pemerintahan. Pemerintah juga telah berupaya merencanakan berbagai pembangunan di berbagai sektor, baik pembangunan secara materiil maupun spiritual guna mewujudkan suatu masyarakat yang sejahtera, adil, dan makmur.

Salah satu usaha yang bisa dilakukan untuk menghidupi kebutuhan sehari-hari adalah dengan cara berdagang. Para pedagang ini biasa PKL. Pedagang kaki lima (disingkat PKL) adalah istilah untuk menyebut penjaja dagangan yang melakukan kegiatan komersial di atas daerah milik jalan (DMJ/trotoar) yang (seharusnya) diperuntukkan untuk (*pedestrian*).² PKL sendiri memiliki peranan yang sangat vital di dalam pembangunan dan pertumbuhan ekonomi di negara-negara berkembang seperti Indonesia. Di Indonesia, selain berperan dalam pertumbuhan pembangunan dan ekonomi, PKL juga memiliki peranan yang sangat penting dalam mengatasi masalah pengangguran. Tumbuhnya para PKL menjadikannya sebagai sumber pertumbuhan kesempatan kerja.

¹Marito Sipahutar, “*Perlindungan Hukum Terhadap Fakir Miskin Berdasarkan Undang-Undang No.13 Tahun 2011 Ditinjau Dari Perspektif Fiqh Siyash (Studi Kasus Di Kecamatan Bilah Barat Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2014-2019)*,” *Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan*, 2020, Skripsi

²Pedagang Kaki Lima, diunduh pada tanggal 21 mei 2023 dari https://id.wikipedia.org/wiki/Pedagang_kaki_lima

Umumnya, permasalahan yang menghambat perkembangan pelaku PKL seperti minimnya produktivitas, ketersediaan sumber daya produksi yang terbatas, rendahnya kualitas akelembagaan, organisasi, serta iklim usaha yang semakin buruk. Salah satu cara dalam pengembangan para PKL tersebut adalah dengan memberikan bantuan modal dimana sumber dari bantuan tersebut bisa saja berasal dari zakat. Zakat merupakan bagian dari harta wajib zakat yang dikeluarkan untuk para mustahik dalam waktu tertentu dengan nilai tertentu dan sasaran tertentu.³ Selanjutnya peran suatu lembaga organisasi atau pemegang kekuasaan yang bertugas mengatur serta mengayomi masyarakat juga diperlukan, yakni melibatkan Amilin, Khalifah atau pemimpin yang aktif dalam mengatur dan melaksanakan kegiatan zakat tersebut.

Zakat memiliki arti dan kedudukan yang amat penting karena merupakan titik sentral dari sistem agama Islam dalam mewujudkan kesejahteraan sosial. Dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan zakat bukanlah semata-mata diserahkan kepada kesadaran muzakki, akan tetapi terdapat juga rasa tanggung jawab pengelolaannya oleh Amilin.⁴ Zakat sendiri dapat didayagunakan untuk usaha produktif dalam rangka penanganan fakir miskin dan peningkatan kualitas umat. Hal ini dapat dilakukan apabila kebutuhan dasar *mustahiq* telah terpenuhi.⁵ Yang dimaksud dengan usaha produktif adalah suatu jenis usaha yang mampu meningkatkan taraf hidup, dan kesejahteraan masyarakat. Maksudnya adalah meningkatkan kualitas sumber daya manusia.⁶ Hukum Islam adalah suatu sistem hukum yang hendak mewujudkan kebahagiaan bagi kehidupan manusia baik yang bersifat individu, masyarakat dan bernegara yang bersumber pada kitab suci Al-Quran.⁷ Tujuan dari Hukum Islam sendiri adalah kemaslahatan hidup manusia, baik secara rohani dan jasmani untuk menciptakan kebahagiaan di dunia maupun di akhirat.⁸ Dan untuk menciptakan kebahagiaan kepada sesama manusia ialah bisa dengan berbagi melalui zakat.

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) merupakan lembaga resmi dan yang dibuat pemerintah dan salah satu tugas yang dimiliki yaitu menghimpun dan menyalurkan dana zakat kepada masyarakat. Di dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan

³ Agus Setiawan dkk., *Fikih Zakat Kontemporer*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2018. hlm 2.

⁴ Didin Hafiduddin, *“Dakwah Aktual”*, Jakarta: Gema Insani Press, 2001, hlm. 224

⁵ Pasal 27 Undang-undang Nomor 27 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat

⁶ Penjelasan pasal 27 ayat (1) Undang-undang Nomor 27 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat

⁷ Ahmad Muslih, *Kedudukan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam*, UNS Press, 2014, hlm. 107.

⁸ Sirman Dahwal, *Hukum Islam Indonesia*, CV. Mandar Maju, Bandung, 2020, hlm 40

Zakat pada Pasal 3 menyebutkan bahwa BAZNAS bertujuan untuk :⁹ Meningkatkan efektifitas dan efisiensi pelayanan dalam pengelolaan zakat; dan Meningkatkan manfaat zakat untuk kepentingan bersama dan pengentasan kemiskinan.

Selain itu, lembaga tersebut juga dapat menjadi alternatif solusi supaya para pelaku usaha kecil dapat dibantu dalam pengembangan usahanya yakni dengan memberikan bantuan modal usaha kepada para PKL. BAZNAS memiliki perwakilan di seluruh provinsi, kota atau kabupaten di Indonesia, termasuk di Kabupaten Lahat.

Pemberian modal usaha yang diambil dari dana zakat tidak akan dapat efektif jika tidak dapat mengukur secara akurat tingkat pencapaian keberhasilan. Mengukur secara akurat ini penting sebab BAZNAS dapat membantu mustahik secara efektif jika tidak mengetahui pengetahuan dan keterampilan yang dikuasai setiap mustahiknya dan kekurangan apa yang masih menjadi masalah bagi mustahik.

Hal yang sama pentingnya adalah BAZNAS tidak dapat memperbaiki kesalahan yang mungkin terjadi jika tidak memperoleh indikasi efektifitas dalam memberikan zakat sebagai modal usaha. Efektifitas dapat diartikan mengukur dan menggambarkan pengetahuan dan ketrampilan *mustahik* atau sebagai dasar untuk mengambil keputusan. Informasi ini dapat digunakan untuk merencanakan pendistribusian zakat sebagai modal usaha selanjutnya dan memberikan nasehat untuk metode pendayagunaan zakat alternatif. Berangkat dari paparan ini, penulis berpendapat bahwa program Lahat Peduli dari BAZNAS ini sangat menarik untuk dikaji baik itu dalam tataran konsep maupun prakteknya. Tulisan ini bertujuan untuk mengkaji penyaluran sebagai bantuan modal usaha kepada Pedagang Kaki Lima (PKL) dan tanggung jawab oleh BAZNAS Kabupaten Lahat dalam program Lahat Peduli.

Pembahasan

1. Implementasi Permenko No.1 Tahun 2022 dalam penyaluran KUR tanpa agunan terhadap nasabah UMKM di Kota Bengkulu

Kredit Usaha Rakyat (KUR) merupakan penyaluran pinjaman Bank yang paling populer dan berkembang ditengah tengah masyarakat yang tentu saja sangat diminati oleh hampir seluruh pelaku usaha terutama bagi para pelaku usaha yang saat ini mengalami persoalan finansial dalam pengembangan usahanya, baik bagi mereka yang

⁹ Pasal 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat

baru akan memulai usaha maupun bagi pelaku usaha yang telah berjalan menghadapi persoalan keuangan dalam rangka pengembangan usahanya.

Program Kredit Usaha Rakyat (KUR) untuk pertama kalinya digagas oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan diluncurkan pada bulan November tahun 2007 melalui Instruksi Presiden No. 6 Tahun 2007 tentang Kebijakan Pemerintah melalui percepatan pengembangan sektor riil dan pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) yang bertujuan untuk memberikan bantuan modal usaha kepada setiap pelaku UMKM dalam rangka pengembangan usahanya kearah yang lebih baik dan maju.

Menyikapi kebijakan Pemerintah sebagaimana tertuang dalam Intruksi Presiden No.6 tahun 2007 tersebut, maka Bank Indonesia Sebagai Bank Sentral yang diberi kewenangan dalam pengelolaan penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR). Kemudian merespon kebijakan pemerintah tersebut dengan mengeluarkan kebijakan berupa Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/22/PBI/ 2012 tentang Pemberian Kredit Atau Pembiayaan Oleh Bank Umum dan Bantuan Teknis Dalam Rangkaian Pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, Dikatakan bahwa Bank umum wajib memberikan kredit atau pembiayaan UMKM, yang mana jumlah kredit atau pembiayaan UMKM ditetapkan paling rendah 20 % (dua puluh persen) yang dihitung berdasarkan rasio kredit atau pembiayaan UMKM terhadap total kredit atau pembiayaan.¹⁰

Kredit Usaha Rakyat (KUR) bersumber dari dana perbankan atau lembaga keuangan yang merupakan Penyalur KUR. Dana yang disediakan berupa dana keperluan modal kerja serta investasi yang disalurkan kepada pelaku UMKM individu/perorangan, badan usaha dan/atau kelompok usaha yang memiliki usaha produktif dan layak . Adapun tujuan KUR antara lain adalah untuk meningkatkan dan memperluas akses pembiayaan kepada usaha produktif, Meningkatkan kapasitas daya saing usaha mikro, kecil dan menengah, serta mendorong pertumbuhan ekonomi dan penyerapan tenaga kerja.

Guna mencapai tujuan di atas, maka pelaksanaan KUR harus diupayakan secara optimal dengan perencanaan yang membutuhkan pengkajian secara komprehensif. Salah satunya perlu dipertimbangkan dalam menentukan bank- bank mana sajakah yang dipercaya oleh pemerintah untuk dapat menyelenggarakan dan menyalurkan program KUR terhadap UMKM. Menurut Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomo

¹⁰ Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/22/PBI/2012 tentang Pemeberian Kredit ata Pembiayaan oleh BankUmum dan Batuan Teknis Dalam Rangkaian Pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.

20/PMK.05/2015 tentang Tata Cara Pelaksanaan Subsidi Bunga Untuk Kredit Usaha Rakyat , Pasal 1 ayat (5) menyatakan bahwa : penyalur KUR adalah bank atau lembaga keuangan yang ditunjuk untuk menyalurkan KUR. Berdasarkan amanah peraturan menteri tersebut , maka pemerintah telah memutuskan bahwa kebijakan mengenai penyaluran KUR di Indonesia dapat disalurkan oleh bank yang ikut menandatangani nota Kesepahaman Bersama tentang Penjaminan Kredit /pembiayaan kepada Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi . Bank yang dimaksud adalah Bank Mandiri, BRI, BNI, Bukopin, BTN, dan Bank Syariah Mandiri dan BNI Syariah serta seluruh Bank Pembangunan Daerah (BPD) yang tersebar di seluruh Indonesia.¹¹ Kebijakan pemerintah ini harus didukung dan ditindak lanjuti secara terus menerus, hingga saat ini penyaluran KUR dapat juga dilaksanakan oleh lembaga keuangan lain seperti Pegadaian.

Permenko 2 Tahun 2021 tentang perubahan kedua Permenko 8 tahun 2019 yang mengatur tentang pedoman pelaksanaan KUR. Peraturan tersebut mengakomodir beberapa hal sebagai berikut: KUR Super Mikro, KUR Mikro, dan KUR Kecil dengan nilai plafon pembiayaan/kredit maksimal Rp100 juta tidak dipersyaratkan adanya agunan tambahan. Hanya diperbolehkan adanya agunan pokok berupa usaha yang dibiayai oleh pembiayaan/kredit tersebut. Permenko Nomor 2 Tahun 2021 kemudian dikeluarkan lagi Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 1 Tahun 2022 menjelaskan terdapat lima jenis KUR yang dapat disalurkan kepada masyarakat. Jenis KUR yang dimaksud adalah :

1) KUR Super Mikro

Merupakan KUR yang diberikan dengan plafon kredit/pembiayaan sampai dengan Rp10 juta per penerima KUR. KUR Super Mikro ini diprioritaskan untuk dapat disalurkan kepada ibu rumah tangga dan/atau pekerja terkena pemutusan hubungan kerja (PHK) yang berusaha. Berbeda dengan skema KUR lainnya, KUR Super Mikro tidak mensyaratkan minimal lama usaha. Namun demikian, calon penerima KUR Super Mikro yang belum memiliki usaha selama 6 bulan, wajib mengikuti pelatihan atau pendampingan usaha. Skema KUR Super Mikro yang hadir pada masa pandemi Covid-19 menawarkan fitur yang mudah dan cepat. Dari

¹¹ Muhamad Agus Sudrajat, Analisis Pengaruh Kredit Usaha Rakyat Terhadap Sustainability Profit Lokasi Usaha Sebagai Variabel Moderating Pada UMKM di Kabupaten Ngawi, *Jurnal Sosiologi* Vol 2 No.1, Mei 2018, ISSN:2615-7500

sisi agunan tambahan, penerima KUR Super Mikro tidak dipersyaratkan agunan tambahan. Adapun jangka waktu KUR Super Mikro adalah 3 tahun untuk kredit/pembiayaan modal kerja 3 dan 5 tahun untuk kredit/pembiayaan investasi.

2) KUR Mikro

Merupakan skema KUR dengan plafon di atas Rp10 juta sampai dengan Rp100 juta per penerima KUR. Dalam memperoleh KUR Mikro, penerima KUR tidak diwajibkan agunan tambahan dan tanpa perikatan. Hal tersebut bertujuan untuk mempermudah usaha mikro mengakses KUR namun tetap menjaga prinsip kehati-hatian lembaga penyalur KUR. Bagi penerima KUR Mikro di sektor produksi, plafon KUR Mikro dapat disuplesi kembali tanpa adanya batas maksimal akumulasi plafon KUR. Artinya, usaha mikro di sektor produksi dapat mengakses KUR Mikro kembali setiap kali KUR Mikro sebelumnya telah lunas.

3) KUR Kecil

Merupakan KUR dengan plafon di atas Rp100 juta sampai dengan Rp500 juta. Pada fase ini, usaha mikro akan didorong untuk mengembangkan usahanya dan bertransformasi menjadi usaha kecil dan menengah. Setelah mengakses KUR Kecil, maka UMKM tersebut dianggap telah dapat secara mandiri mengakses kredit/pembiayaan dengan skema komersial dari lembaga keuangan formal. Sesuai ketentuan terbaru, kredit/pembiayaan dengan plafon maksimal Rp100 juta tidak dipersyaratkan adanya agunan tambahan. Jangka waktu kredit tersebut paling lama 4 tahun untuk kredit/pembiayaan modal kerja, dan paling lama 5 tahun untuk kredit/pembiayaan investasi.

4) KUR Khusus

Merupakan KUR dengan plafon sampai dengan Rp500 juta per Penerima KUR. Adapun KUR Khusus ini diberikan kepada penerima KUR yang tergabung dalam suatu kelompok yang memiliki mitra usaha. Skema ini diberikan kepada kelompok yang dikelola secara bersama dalam bentuk klaster dengan menggunakan mitra usaha untuk komoditas perkebunan rakyat, peternakan rakyat, perikanan rakyat, industri Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, atau komoditas sektor produktif lain yang bisa dikembangkan menjadi KUR khusus. Jangka waktu kredit sama dengan KUR lain yaitu paling lama 4 tahun untuk kredit /pembiayaan modal kerja dan paling lama 5 tahun untuk kredit investasi.

5) KUR Penempatan Tenaga Kerja Indonesia

Merupakan KUR dengan plafon sampai dengan Rp100 juta per Penerima KUR. Skema ini diberikan dalam rangka pembiayaan penempatan bagi Pekerja Migran Indonesia (PMI) dan dan peserta magang di luar negeri. Untuk memaksimalkan UMKM dalam menjalankan usaha perlu didukung oleh semua pihak yang terkait, agar usahanya tetap bertahan dan bertumbuh. Sama dengan KUR yang lain, jangka waktu kredit diberikan paling lama 4 tahun, dengan suku bunga sebesar 6 % pertahun. Direktur Bisnis Mikro BRI, Bapak Supari menyatakan bahwa BRI sebagai Bank penyalur KUR terbesar merencanakan penyaluran KUR tahun 2023 dimulai pada Bulan Maret. BRI mendapatkan alokasi penyaluran KUR tahun 2023 sebesar Rp270 triliun, namun khusus tahap awal pencairan pada bulan Maret 2023 ini telah dialokasikan KUR sebesar Rp12 triliun. Sesuai ketentuan dari pemerintah, terdapat perbedaan ketentuan dalam penyaluran KUR 2023 dibandingkan dengan KUR pada tahun-tahun sebelumnya.¹²

Selanjutnya beliau menjelaskan bahwa khususnya mengenai suku bunga KUR BRI di tahun ini, terdapat sedikit perbedaan dengan KUR tahun-tahun sebelumnya. Peminjam KUR yang baru pertama kali pinjam akan dikenakan bunga sebesar 6% efektif per tahun untuk pinjaman diatas Rp 10 juta (KUR Mikro dan KUR Kecil). Namun jika sudah pernah meminjam lebih dari satu kali maka suku bunga yang dibebankan ke nasabah akan lebih tinggi. “Bunga akan naik menjadi 7% saat mengambil pinjaman KUR yang kedua kalinya. Kemudian naik 8% untuk pinjaman yang ketiga dan seterusnya sampai ke 9%. Apabila ditelaah penjelasan dari bapak Supari di atas, merupakan implementasi dari amanah Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian No 1 Tahun 2023 tentang Pedoman Pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat (KUR).

Bertolak dari tidak tercapainya target penyaluran KUR 100% secara nasional baik dari tahun 2022 yang hanya 97,5% dan tahun tahun sebelumnya yang diindikasikan akibat asas kehati hatian pihak Bank yang masih meminta barang jaminan sebagai agunan berupa BPKB Motor, mobil serta sertifikat tanah maupun rumah, menyebabkan

¹² https://bri.co.id/lcs/-/asset_publisher/G3x3P8wG7JRn/content/kur-bri-2023-sudah-dibuka-simak-syarat-dan-ketentuannya-

debitur tidak dapat memenuhinya. Hal ini tentu saja berdampak terhadap realisasi penyaluran KUR sebagaimana yang di tetapkan pemerintah.

Menyadari akan sikap pihak Bank yang tidak mengindahkan himbauan pemerintah agar setiap debitur tidak dibebankan untuk melengkapi persyaratan jaminan agunan, maka Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia mengeluarkan peraturan No.1 Tahun 2023, tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian No. 1 Tahun 2022 tentang pedoman pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat. Adapun peraturan Menko perekonomian No 1 Tahun 2023 tersebut dengan tegas menyatakan terutama Pasal 14 ayat (1) menyatakan bahwa agunan KUR terdiri atas a. agunan pokok berupa usaha atau obyek yang dibiayai oleh KUR. Dan b. yakni agunan tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat 1, tidak diberlakukan bagi KUR dengan plafon pinjaman sampai dengan Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah). Adapun sanksi yang diberlakukan terhadap pihak penyalur KUR sebagaimana dinyatakan pada Pasal 14 ayat (5), dinyatakan bahwa : “ Dalam hal penyalur KUR meminta agunan tambahan pada KUR dengan plafon pinjaman sampai dengan Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Penyalur KUR dikenakan sanksi berupa Subsidi Bunga / Subsidi Marjin KUR tidak dibayarkan atas penerima KUR yang bersangkutan.

Implementasi Menko Bidang Perekonomian No.1 tahun 2023 dalam penerapan yang dilakukan Penyalur KUR, dalam penelitian ini yakni Bank Rakyat Indonesia yang meliputi beberapa Bank Unit BRI di kota Bengkulu, berdasarkan hasil wawancara terhadap beberapa nasabah/ debitur, dapat dilihat pada tabel di bawah ini. Daftar Penerima Pinjaman Kredit Usaha Rakyat (KUR) di Kota Bengkulu yakni :

No	Nama	Usaha	Tahun Pinjaman	Besar Pinjaman	Jaminan
1	Dediyanto	Kuliner	2023	15 juta	Tidak ada
2	Jaya	Wr manisan	2023	12 juta	Tidak ada
3	Nurjaan	Penjual ikan	2022	15 juta	BPKB
4	Ratna	Mie ayam	2023	7 juta	Tidak ada
5	Lila	Buah	2023	30 juta	BPKB
6	Herdi	Kuliner	2023	20 juta	BPKB
7	Gd S	Manisan	2023	50 juta	Tidak ada
8	Yulianto	Pg Sayur	2023	15 juta	Tidak ada
9	Mirson	Bengkel	2023	75 juta	Tidak ada
10	K Widiyanto	Ternak	2023	15 juta	Tidak ada
11	Subekti	Ternak	2023	20 juta	Tidak ada

12	Surya	Kost	2021	50 juta	Sertifikat
13	Rafif	Supir	2021	10 juta	BPKB
14	Sigit	Manisan	2023	15 juta	Tidak ada
15	Joko	Ternak	2023	15 juta	Tidak ada
16	Masiun	Kuliner	2023	20 juta	Tidak ada
17	Rivlan	Pertanian	2023	10 juta	Tidak ada
18	Hendra	Manisan	2023	20 juta	Tidak ada
19	Purnomo	Pertanian	2023	10 juta	Tidak ada
20	Ali Afrianto	Kerajinan	2023	15 juta	Tidak ada
21	Arianto	Pg beras	2023	25 juta	Tidak ada
22	Youlen	Butik	2021,2023	50 juta	Tidak ada

Sumber : diolah dari hasil penelitian

Mencermati hasil penelitian sebagaimana tertera pada tabel di atas, menunjukkan bahwa debitur/ pelaku UMKM terdiri atas berbagai latar belakang jenis usaha dengan besaran pinjaman terkecil Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) sampai yang terbesar Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah). Adapun implementasi dari Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian No.1 Tahun 2023 Pasal 14 ayat (1) tentang agunan pokok dan agunan tambahan serta ayat (5) tentang sanksi terhadap penyalur KUR, dalam hal ini pihak Bank Rakyat Indonesia Bengkulu telah melaksanakan sebagaimana mestinya. Hal ini dapat dilihat dari 22 nasabah Bank rakyat Indonesia Bengkulu, terdapat 16 nasabah yang menerima pinjaman KUR tidak menggunakan jaminan agunan. Sedangkan 6 nasabah, menggunakan jaminan BPKB kendaraan dan sertifikat sebagai agunan. Hal ini terjadi karena pada saat akad kredit dilakukan pada Tahun 2021 dan 2022. Sebelum dikeluarkannya Permen Koordinator Bidang Perekonomian No. 1 Tahun 2023. Adapun terhadap responden No. 22 sebagaimana dijelaskan pada saat wawancara, yang bersangkutan menyatakan bahwa responden melakukan peminjaman KUR sudah 2 kali. Pinjaman pertama dilakukan pada tahun 2021 dan diwajibkan menyertakan jaminan sertifikat tanah sebagai agunan. Sedangkan pada pinjaman ke dua pada bulan oktober 2023, jaminan sertifikatnya dikembalikan.

Berdasarkan uraian sebagaimana yang diuraikan di atas, sesungguhnya proses penyaluran pinjaman Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang diselenggarakan setiap Unit Bank Rakyat Indonesia di Kota Bengkulu, telah dijalankan sebagaimana yang diamanatkan dalam Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia. No. 1 tahun 2023.

2. Masalah Masalah dalam Implementasi Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian No. 1 Tahun 2022 Dalam Proses Pengajuan Pinjaman KUR

Penyaluran pinjaman Kredit Usaha Rakyat dari tahun ketahun mengalami peningkatan. Hal ini ditandai dengan alokasi anggaran yang terus meningkat setiap tahunnya. Alokasi anggaran pada tahun 2021 mencapai, 281,86 triliun, selanjutnya pada tahun 2022, realisasi alokasi anggaran sebesar 365,50 triliun. Kemudian alokasi anggaran pada tahun 2023 senilai, 450 triliun dan ditahun 2024 ditargetkan alokasi anggaran di atas 500 triliun.

Sedemikian besarnya alokasi anggaran terhadap penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR), tentu semata mata hanya untuk membantu para pelaku UMKM agar persoalan modal kerja dalam rangka pengembangan usaha setiap UMKM ,mampu berkembang, maju, mandiri sehingga pada gilirannya dapat bersaing secara global di dunia internasional. Akan tetapi dalam implementasi Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian No. 1 Tahun 2022, ternyata dalam menerapannya dikalangan masyarakat terutama pelaku usaha dalam mengajukan pinjaman KUR banyak mengalami kendala yang berkaitan dengan jaminan agunan sebagai salah satu syarat yang harus dipenuhi oleh debitur. Sehingga pinjaman yang diajukan debitur akan ditolak pihak Bank jika tidak disertai dengan jaminan agunan.

Amanah Peraturan Menko Perekonomian No.1 Tahun 2022 apabila dikaitkan dengan kebijakan pihak penyalur Kridit Usaha Rakyat (KUR), ternyata belum sepenuhnya dilaksanakan pihak Bank sebagaimana mestinya. Asas kehati hatian yang diterapkan pihak Bank dengan mewajibkan jaminan agunan bagi debitur tentu akan sangat memberatkan bagi mereka. Sedangkan bagi pihak Bank, kewajiban debitur memberi jaminan agunan, baik berupa BPKB atau Sertifikat tanah/rumah, diharapkan setelah pinjaman diperoleh debitur, mereka merasa terikat untuk tetap membayar cicilan setiap bulannya selama jangka waktu pinjaman.

Persyaratan pengajuan KUR, apabila pencairan pinjaman senilai Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) debitur harus menyertakan jaminan agunan berupa BPKB sepeda motor, dan jika pinjaman sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), jaminan agunan berupa BPKB Mobil atau sertifikat tanah/rumah, walaupun sesungguhnya jika debitur tidak membayar cicilan/kredit macet pihak Bank tidak akan melakukan penyitaan aset yang diagunkan. Maka pihak Bank akan memasukkan dalam daftar *BI Checking/*

daftar hitam akan berakibat kepada yang bersangkutan tidak pernah dapat lagi melakukan pinjaman disetiap lembaga Perbankan selagi *BI Checking* belum dicabut/diputihkan.

Menyadari bahwa pelaksanaan penyaluran KUR yang masih menghadapi kendala akibat kebijakan yang diambil pihak Bank dalam penyertaan jaminan agunan terhadap calon debitur, walaupun sesungguhnya berdasarkan peraturan Menko Bidang Perekonomian No.1 Tahun 2022, yang tidak mensyaratkan jaminan agunan dalam pengajuan Kredit Usaha Rakyat, maka melalui Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia No. 1 Tahun 2023 tentang perubahan atas peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian No.1 Tahun 2022, disebutkan terutama dalam Pasal 15 ayat (5): “Dalam hal penyalur KUR meminta agunan tambahan pada KUR dengan plafon pinjaman sampai dengan Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) sebagaimana dimaksud pada ayat (3), penyalur KUR dikenakan sanksi berupa subsidi bunga/subsidi marjin KUR tidak dibayar atas penerima KUR yang bersangkutan. Adapun bunyi Pasal 14 ayat (5) tersebut, pemerintah melalui Menko Perekonomian mempertegas bagi siapa saja pihak penyalur KUR untuk mematuhi pasal tersebut, jika tidak maka sanksi akan dikenakan terhadap pihak yang bersangkutan.

Implementasi Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia No. 1 tahun 2023, yang telah berlaku dalam beberapa bulan terakhir, dengan tujuan untuk membantu pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) yang membutuhkan modal usaha, ternyata masih menemui beberapa kendala. Hal ini dapat diketahui dari anggapan sebagian pelaku UMKM yang beranggapan bahwa pengajuan pinjaman Kredit Usaha Rakyat (KUR) dirasa sulit. “Slogan Pinjaman KUR tanpa jaminan agunan hanya teori semata”. Anggapan tersebut tentu dapat dimaklumi, karena pada tahun tahun sebelumnya sebelum pemberlakuan peraturan Menko Perekonomian No. 1 Tahun 2023, yang bersangkutan dalam pengajuan pinjaman KUR ditolak oleh pihak penyalur KUR akibat yang bersangkutan tidak memiliki jaminan agunan. Sikap pesimis pelaku UMKM terhadap lembaga penyalur KUR juga bisa dimaklumi. Hal ini akibat dari kurangnya sosialisasi dari pihak penyalur KUR/Bank, bahwa proses pengajuan pinjaman KUR memang benar benar tanpa jaminan agunan, sehingga pengalaman dimasa lalu tentang sulit dan ditolaknya pengajuan pinjaman oleh pihak penyalur KUR/Bank masih membekas dan menjadi pengalaman pahit buat mereka. Faktor lain yang menjadi masalah, terutama bagi pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah dalam pengajuan pinjaman

Kredit Usaha Rakyat (KUR) adalah bagi pelaku usaha yang akan melakukan pinjaman untuk kedua kalinya.

Berdasarkan hasil wawancara terhadap salah satu responden yang akan mengajukan pinjaman KUR untuk yang kedua kalinya, ternyata ditolak oleh pihak Bank, walaupun selama 3 tahun mencicil pinjaman, responden tersebut tidak pernah telat/menunggak. Menurut pihak bank, tidak disetujuinya pinjaman karena tidak lolos survei. Dan alasan lain menurut pihak Bank, penyaluran pinjaman KUR lebih ditujukan kepada mereka yang belum atau baru pertama kali mengajukan pinjaman, Hal ini dikarenakan kuota yang ada sangat terbatas, sedangkan yang akan meminjam masih banyak. Oleh karenanya pihak Bank menyarankan untuk mengajukan pinjaman komersil, dengan konsekwensi tingkat suku bunganya cukup tinggi dan dijamin dalam 3 hari kerja pengajuan pinjaman disetujui/direalisasikan. Oleh responden saran pihak Bank ditolak/tidak disanggupi, karena responden merasa jumlah cicilan ditambah bunga angsuran perbulan terasa sangat berat/tidak mampu.

Penutup

Pengumpulan, pengelolaan, dan penyaluran dana zakat, infak, dan sedekah oleh BAZNAS telah berlangsung dengan baik dan efektif. Hal ini terlihat dari penyaluran zakat sebagai bantuan modal usaha telah memberikan dampak yang cukup efektif serta membantu para PKL yang mengajukan permohonan bantuan dimana mereka memiliki keterbatasan modal. BAZNAS Kabupaten Lahat telah sepenuhnya melakukan apa yang diperintahkan oleh Undang-undang No 23 tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat. Mereka juga melakukan pelaporan pengelolaan keuangan untuk menjaga transparansi kinerja Pengawasan terhadap mereka dilakukan oleh Bupati sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Lahat Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Zakat, Infaq dan Sedekah. Keterlibatan masyarakat juga ikut andil dalam pengawasan kerja BAZNAS Kabupaten Lahat.

Referensi

Agus Setiawan dkk.(2018). *Fikih Zakat Kontemporer*, Jakarta : PT Raja Grafindo Persada.

Ahmad Muslih. (2014). *Kedudukan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam*, Surakarta : UNS Press.

Andry Harijanto Hartiman. (2021) *Pragmatis : Metode Penelitian Hukum Empiris*, Koperasi Bina Mitra Justitia (KBMJ). Bengkulu : Fakultas Hukum Universitas Bengkulu.

Rendi Prayoga, Dimas Dwi Arso, Akhmad Muslih| Efektivitas Penyaluran Zakat sebagai Bantuan Modal Usaha Kepada Pedagang Kaki Lima (PKL)

Didin Hafiduddin. (2001). *Dakwah Aktual*, Jakarta: Gema Insani Press.

EfrinSyamsul Bahri, dkk (2020), *Analisis Efektivitas Penyaluran Zakat pada Badan Amil Zakat Nasional*.

Sirman Dahwal. (2020) *Hukum Islam Indonesia* Bandung : CV. Mandar Maju.

Wawancara dengan Bapak M. Fiqri Yassin staf pendistribusian dan pendayagunaan zakat BAZNAS Kabupaten Lahat, tanggal 27 Februari 2023, pukul 10.05 Wib

Wawancara dengan Bapak H. Hamdi Arsal, Ketua BAZNAS Kabupaten Lahat tanggal 27 february 2023 pukul 09.55 WIB

Wawancara dengan Bapak M. Fiqri Yassin staf pendistribusian dan pendayagunaan zakat BAZNAS Kabupaten Lahat, tanggal 27 Februari 2023, pukul 10.05 Wib